

PERAN PEREMPUAN DALAM PEACEBUILDING KONFLIK DI SURIAH: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM RESOLUSI KONFLIK

Mayza Ariella Nurandriyanti *¹
Prilla Marsingga²

^{1,2} Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia.

*e-mail: 2310631260008@student.unsika.ac.id¹, prilla.marsingga@fisip.unsika.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan dalam peacebuilding di Suriah, sebuah negara yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi terhadap berbagai sumber sekunder, penelitian ini mengidentifikasi bahwa perempuan di Suriah menghadapi tantangan besar, termasuk kekerasan berbasis gender, kurangnya representasi, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan sumber daya. Meskipun demikian, mereka tetap berperan aktif dalam berbagai inisiatif perdamaian, baik melalui komunitas akar rumput, jaringan solidaritas, maupun advokasi global.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan dalam peacebuilding di Suriah perlu diperkuat melalui kebijakan inklusif yang mendukung partisipasi mereka dalam proses resolusi konflik. Dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesempatan ekonomi, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, perempuan dapat berkontribusi lebih efektif dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis gender diperlukan dalam upaya rekonstruksi pascakonflik di Suriah.

Kata kunci: konflik, peacebuilding, perempuan, Suriah.

Abstract

This research aims to analyze the role of women in peacebuilding in Syria, a country that has experienced prolonged conflict. Using a qualitative approach with a content analysis method of various secondary sources, this research identifies that women in Syria face major challenges, including gender-based violence, lack of representation, and limited access to education and resources. Despite this, they continue to play an active role in various peace initiatives, whether through grassroots communities, solidarity networks, or global advocacy.

The results show that women's role in peacebuilding in Syria needs to be strengthened through inclusive policies that support their participation in the conflict resolution process. By improving access to education, economic opportunities, and involvement in decision-making processes, women can contribute more effectively to creating sustainable peace. Therefore, a more comprehensive and gender-based approach is needed in post-conflict reconstruction efforts in Syria.

Keywords: conflict, peacebuilding, women, Syria.

PENDAHULUAN

Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi manusia yang dapat muncul dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi, sosial, maupun di tingkat global. Ketidaksepakatan, perbedaan kepentingan, serta perbedaan nilai dan pandangan sering kali menjadi pemicu utama terjadinya konflik. Konflik merupakan suatu situasi di mana terdapat ketidaksesuaian antara tujuan atau kepentingan dua pihak atau lebih (Galtung, 1996). Beliau menjelaskan bahwa konflik bukan sekadar kekerasan fisik, tetapi juga dapat bersifat struktural dan kultural. Konflik struktural terjadi ketika sistem sosial menciptakan ketidakadilan yang menghambat kelompok tertentu, sementara konflik kultural merujuk pada justifikasi ideologis terhadap kekerasan atau dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya. Menurut Galtung, perdamaian hanya dapat tercapai jika konflik dikelola secara konstruktif melalui transformasi sosial yang mengatasi akar permasalahan konflik itu sendiri (Galtung, 1996).

Dalam upaya penyelesaian konflik, yaitu resolusi konflik (*Conflict Resolution*). Resolusi konflik dapat didefinisikan sebagai proses informal atau formal yang digunakan dua pihak atau lebih untuk menemukan solusi damai atas perselisihan mereka (Putri, 2022). Resolusi konflik tidak hanya sebatas menghentikan perselisihan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik antara pihak yang bertikai melalui pendekatan jangka panjang yang berkelanjutan.

Johan Galtung menjelaskan bahwa terdapat tiga tahap utama yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam upaya menyelesaikan konflik yaitu *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*. *Peacemaking* merujuk pada proses mendamaikan atau merekonsiliasi perbedaan sikap politik serta strategi dari pihak yang berkonflik melalui mediasi, negosiasi, atau arbitrase, terutama di tingkat elit atau pimpinan. Sementara itu, *peacekeeping* berfokus pada upaya menghentikan atau meredam kekerasan dengan intervensi militer yang bertindak sebagai penjaga perdamaian yang bersikap netral. Adapun *peacebuilding* merupakan tahap penerapan perubahan serta rekonstruksi dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi guna menciptakan perdamaian yang berkelanjutan (Anggrein dan Pahlevi, 2024)

Perempuan memiliki peran penting dalam *peacebuilding* atau pembangunan perdamaian. Menurut Cohn (2013), perempuan sering memainkan peran kunci dalam membangun kembali komunitas yang terdampak konflik karena keterampilan mereka dalam mediasi, advokasi, dan penyediaan bantuan kemanusiaan. Paffenholz (2015) mengemukakan bahwa perempuan dapat berkontribusi efektif dalam *peacebuilding* melalui partisipasi dalam dialog perdamaian, pendidikan perdamaian, dan penguatan kapasitas masyarakat untuk mencegah konflik di masa depan. Di Suriah, meskipun perempuan sering menjadi korban konflik, mereka juga menunjukkan peran aktif dalam berbagai upaya perdamaian. Banyak organisasi yang dipimpin oleh perempuan bekerja dalam bidang bantuan kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi, dan advokasi hak asasi manusia. Misalnya, organisasi seperti "*Syrian Women's Network*" dan "*Women Now for Development*" berkontribusi dalam meningkatkan peran perempuan dalam negosiasi perdamaian serta memperjuangkan hak-hak perempuan dalam masa transisi pascakonflik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang dikaji secara mendalam melalui analisis terhadap data yang bersifat non-numerik. Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari hasil penelitian atau dokumen yang telah tersedia sebelumnya. Sumber data sekunder yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik yang dibahas.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola, makna, serta hubungan antara konsep-konsep yang ada dalam penelitian. Analisis ini dilakukan dengan menelaah isi dokumen secara sistematis guna menemukan temuan yang dapat memberikan wawasan baru terkait permasalahan yang dikaji.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang dibahas serta menyajikan analisis yang bersifat komprehensif dan kontekstual. Pendekatan kualitatif berbasis data sekunder juga memungkinkan penelitian ini untuk menginterpretasikan fenomena berdasarkan perspektif yang lebih luas tanpa terikat pada data primer yang harus dikumpulkan secara langsung. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam memahami isu yang sedang diteliti serta memungkinkan eksplorasi terhadap berbagai sudut pandang yang telah disajikan dalam penelitian-penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Resolusi konflik merupakan bentuk intervensi konflik yang dilakukan dengan masuk ke dalam formasi konflik, berkomunikasi dengan setiap aktor, lalu memecahkan dan mengurai formasi konflik tersebut (Pattipeihy, 2021). Resolusi konflik bertujuan untuk mengurangi ketegangan, mencegah eskalasi konflik, serta menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua

pihak. Dengan adanya resolusi konflik, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif untuk bekerja sama, meningkatkan rasa saling menghormati, dan membangun komunikasi yang lebih baik. Selain itu, proses ini juga berperan dalam menciptakan keadilan, menghindari kekerasan, serta mendorong penyelesaian masalah dengan cara yang konstruktif dan berkelanjutan.

Dalam konteks konflik yang ada di Suriah, resolusi konflik merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, kelompok oposisi, organisasi internasional, serta masyarakat sipil. Upaya perdamaian telah dilakukan melalui berbagai inisiatif, seperti perundingan yang dimediasi oleh PBB, perjanjian gencatan senjata, serta program rekonstruksi sosial dan ekonomi. Akan tetapi, terdapat tantangan besar seperti perbedaan kepentingan politik, keterlibatan aktor eksternal, dan masih kuatnya ketegangan sektarian sering kali menghambat implementasi solusi damai yang berkelanjutan. Maka dari itu, pendekatan resolusi konflik yang lebih inklusif, yang melibatkan peran aktif perempuan, kelompok minoritas, serta organisasi masyarakat sipil, menjadi krusial dalam menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Suriah.

Dalam konteks keterlibatan perempuan dalam konflik di Suriah, feminisme liberal, feminisme konstruktivis, dan feminisme pascakolonial menawarkan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Menurut Rizem Aizid dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Feminisme*, menjelaskan bahwa feminisme liberal menekankan pentingnya kesetaraan gender melalui reformasi hukum dan politik, mendorong partisipasi perempuan dalam proses perdamaian formal dan pengambilan keputusan politik. Feminisme konstruktivis berfokus pada bagaimana norma sosial dan budaya membentuk identitas gender, menyoroti peran perempuan dalam membentuk kembali struktur sosial selama dan setelah konflik. Sementara itu, feminisme pascakolonial mengkritisi dominasi narasi Barat dalam diskursus feminis, menekankan pentingnya memahami pengalaman perempuan Suriah dalam konteks sejarah kolonialisme dan dinamika kekuasaan global. Pendekatan ini menyoroti bagaimana perempuan Suriah menghadapi penindasan ganda baik dari struktur patriarki lokal maupun dari intervensi asing dan pentingnya solusi yang berakar pada konteks lokal. Dengan menggabungkan ketiga perspektif ini, dapat dipahami kompleksitas peran perempuan dalam konflik Suriah dan merumuskan strategi pemberdayaan yang lebih efektif dan kontekstual.

Peran Perempuan dalam *Peacebuilding* di Suriah

Dengan melibatkan peran perempuan dalam *peacebuilding* konflik Suriah. Perempuan memainkan peran yang semakin signifikan dalam *peacebuilding* di Suriah, baik dalam ranah formal maupun informal. Meskipun konflik yang berkepanjangan telah membatasi ruang gerak mereka, banyak perempuan yang berkontribusi dalam berbagai aspek rekonstruksi sosial, ekonomi, serta upaya mediasi dan negosiasi damai.

Peran perempuan dalam situasi konflik ini sangat minim dan mayoritas cenderung menekankan sisi negatif dari konflik. Mayoritas Perempuan yang berada di zona konflik menjadi korban, baik oleh pihak lawan maupun pihak mereka sendiri. Perempuan sering dijadikan tawanan oleh pihak lawan, hal ini dilakukan agar apa yang diinginkan pihak lawan dapat tercapai oleh pihak lawan. Tidak jarang sekelompok Perempuan yang ditangkap oleh pihak lawan dipaksa untuk disiksa dalam bentuk kekerasan, pemerkosaan bahkan pembunuhan terhadap perempuan tersebut (Sutantri dan Pratama, 2023).

Sebagian besar pihak yang terlibat langsung dalam konflik adalah laki-laki. Laki-laki sering terlibat dalam konflik sebagai tentara, relawan perang, dan lain-lain, sedangkan perempuan hanya bisa menyaksikannya tanpa diperbolehkan memainkan peran yang sama dengan laki-laki. Perempuan juga sering menjadi korban yang terkena dampak langsung dari perang ini. Namun di balik itu, ternyata perempuan juga mampu berperan sebagai penggagas solusi dalam konflik yang muncul di suatu wilayah (Sutantri dan Pratama, 2023).

Maka dari itu, para perempuan di Suriah telah berpartisipasi dalam berbagai inisiatif perdamaian, termasuk dalam perundingan yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu contohnya adalah Dewan Penasihat Perempuan Suriah (*Syrian Women's Advisory Board, SWAB*) yang dibentuk oleh Utusan Khusus PBB untuk Suriah pada tahun 2016.

Dewan ini memberikan perspektif gender dalam perundingan dan menekan agar resolusi konflik lebih inklusif terhadap hak-hak Perempuan.

Meskipun representasi perempuan dalam perundingan masih minim, keterlibatan mereka dalam diplomasi informal sangat signifikan. Banyak perempuan yang bertindak sebagai mediator lokal dalam mengatasi konflik komunitas, membantu negosiasi antara kelompok bersenjata, atau mendamaikan ketegangan antar-etnis dan sektarian di wilayah tertentu.

Tantangan yang Dihadapi Perempuan dalam *Peacebuilding*

1. Kekerasan berbasis gender

Kekerasan berbasis gender merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling umum di dunia dimana hal ini tidak mengenal batas sosial, ekonomi atau nasional. Menurut laporan tahunan PBB, di seluruh dunia diperkirakan satu dari tiga perempuan akan mengalami pelecehan fisik atau seksual dalam hidupnya (*Human Rights Council*, 2018). Hal ini juga terjadi pada Perempuan di Suriah. Kekerasan terhadap perempuan dianggap sangat umum terjadi, khususnya pelecehan verbal, kekerasan dalam rumah tangga dan pernikahan dini pada anak perempuan di bawah umur. Masalah ini semakin memprihatinkan mengingat krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Suriah akibat dampak perang di sana. Kekerasan berbasis gender ini mempunyai konsekuensi buruk bagi masa depan perempuan dan anak perempuan di Suriah. Mereka menghadapi beban terberat dari krisis. Suriah karena keadaan seperti ini terus mengganggu kehidupan hingga mereka tidak merasa aman.

2. Kurangnya Representasi

Kurangnya representasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan di Suriah khususnya dalam proses formal resolusi konflik dan pengambilan keputusan strategis, mencerminkan tantangan besar yang dipengaruhi oleh struktur sosial patriarki, konflik berkepanjangan, dan stereotip gender yang mengakar. Perempuan sering kali tidak dilibatkan dalam berbagai perihal. Para perempuan ini dianggap tidak punya pilihan dan harus menanggung berbagai beban berat, bahkan beberapa di antaranya menanggung beban sekaligus untuk menjadi kepala rumah tangga, menjaga anak-anaknya, dan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.

Para perempuan yang bekerja juga tidak serta merta bisa memenuhi kebutuhannya karena perempuan digaji lebih sedikit dan tidak punya kesempatan adil untuk meraih posisi yang lebih tinggi. Sementara itu, banyak pernikahan dini yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan, kemiskinan, dan faktor keamanan. Anak-anak yang lahir di kamp pengungsian, baik di Suriah maupun di luar negeri, juga sulit mendapatkan dokumen legal yang disebabkan oleh konflik dan keterbatasan biaya. Hal ini yang menyebabkan siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender di Suriah terus berlanjut dan akan sulit diberantas jika konflik masih terus berlanjut dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki keadaan dari semua pihak yang terlibat. Beberapa perempuan di Suriah juga dipaksa untuk merubah nasibnya sendiri agar tidak terus terinjak oleh sistem patriarki. Perempuan-perempuan ini memutar otak untuk mencari nafkah dengan menjadi pengusaha dan memperkerjakan perempuan Suriah lain.

3. Keterbatasan Akses

Keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan sumber daya menjadi tantangan besar yang dihadapi perempuan Suriah dalam berkontribusi secara efektif pada upaya *peacebuilding*. Konflik berkepanjangan tidak hanya menghancurkan infrastruktur fisik, tetapi juga menciptakan hambatan sosial dan ekonomi yang memperparah ketidaksetaraan gender. Dalam banyak kasus, perempuan dipinggirkan dari ruang-ruang yang dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk berperan aktif sebagai agen perubahan.

Perempuan sering kali dianggap tidak membutuhkan pendidikan tinggi atau pelatihan profesional, terutama di masyarakat yang lebih konservatif. Konflik juga memperparah kondisi ini, karena prioritas banyak keluarga adalah bertahan hidup, sehingga pendidikan bagi anak perempuan sering kali dikorbankan. Selain itu, perempuan sering kali dikesampingkan dari proses pengambilan keputusan dan negosiasi perdamaian, baik di tingkat lokal maupun nasional. Padahal, perempuan sering memiliki perspektif unik yang berakar pada pengalaman mereka sebagai penyedia bantuan di komunitas dan pelindung keluarga selama konflik.

Peluang dan Prospek Masa Depan

1. Peran di Komunitas Akar Rumput

Perempuan di komunitas akar rumput di Suriah memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan masyarakat selama masa konflik berkepanjangan. Di tengah kerusakan infrastruktur, krisis kemanusiaan, dan hilangnya rasa aman, perempuan sering menjadi pelaku utama dalam membangun kembali hubungan sosial dan mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Sebagai mediator di tingkat lokal, perempuan sering kali dipercaya untuk membantu memecahkan konflik kecil antarindividu atau kelompok, karena mereka dianggap mampu membawa perspektif yang lebih inklusif dan menenangkan. Mereka juga menjadi tulang punggung dalam penyediaan bantuan kemanusiaan, seperti distribusi makanan, air bersih, dan kebutuhan medis, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh organisasi bantuan besar.

Perempuan memimpin berbagai inisiatif komunitas untuk memulihkan pendidikan anak-anak, memberikan pelatihan keterampilan, dan menciptakan lapangan kerja skala kecil bagi keluarga yang kehilangan penghidupan mereka akibat perang. Inisiatif ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal tetapi juga menjadi landasan penting untuk memulihkan stabilitas dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut.

2. Jaringan Solidaritas

Perempuan sering membentuk jaringan solidaritas yang kuat baik local maupun internasional untuk mendukung upaya *peacebuilding*. Jaringan solidaritas perempuan di Suriah telah menjadi salah satu kekuatan utama dalam menghadapi dampak konflik berkepanjangan. Di tengah kekacauan perang dan kehancuran sosial, perempuan membentuk aliansi yang berfungsi sebagai ruang kolaborasi, dukungan, dan pemberdayaan. Jaringan ini memainkan peran vital dalam mendukung perempuan lainnya yang terkena dampak konflik sekaligus mempromosikan perdamaian dan keadilan.

Perempuan Suriah menciptakan jaringan solidaritas Melalui organisasi masyarakat sipil dan inisiatif lokal untuk memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan. Bantuan ini meliputi dukungan psikososial bagi korban trauma, distribusi kebutuhan dasar, dan program pelatihan keterampilan. Dalam banyak kasus, jaringan solidaritas ini juga berfungsi sebagai penghubung antara komunitas lokal dan organisasi internasional, memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Selain dukungan kemanusiaan, jaringan solidaritas perempuan di Suriah berperan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Mereka menyuarakan pentingnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Jaringan ini tidak hanya memberikan dukungan individual, tetapi juga memobilisasi upaya kolektif untuk melawan diskriminasi dan stereotip yang mengakar dalam masyarakat.

3. Advokasi Global

Meningkatnya perhatian global terhadap isu gender, Perempuan Suriah memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan internasional dalam memperjuangkan hak-hak mereka akan berkontribusi dalam resolusi konflik. keberhasilan advokasi global bergantung pada kolaborasi erat antara organisasi internasional, pemerintah, dan komunitas lokal. Membangun kepercayaan dan memahami konteks spesifik di Suriah sangat penting agar dukungan yang diberikan benar-benar berdampak positif. Pada akhirnya, dengan sinergi ini, perempuan Suriah tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pemimpin yang mampu menciptakan perubahan nyata dalam masyarakat mereka. Advokasi global memberikan harapan baru bagi perempuan Suriah untuk meruntuhkan hambatan yang ada dan menunjukkan bahwa mereka adalah agen perubahan yang tak tergantikan dalam membangun masa depan damai dan inklusif untuk negara mereka.

KESIMPULAN

Peran perempuan menjadi semakin signifikan, terutama dalam *peacebuilding*. Konflik di Suriah menggambarkan bagaimana perempuan memainkan peran penting dalam berbagai inisiatif perdamaian, meskipun masih menghadapi tantangan seperti kekerasan berbasis gender, kurangnya representasi, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan serta sumber daya. Namun, peluang tetap terbuka melalui peran mereka dalam komunitas akar rumput, jaringan solidaritas,

serta advokasi global yang semakin meningkat. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan dalam *peacebuilding* perlu terus didukung untuk menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem. (2024). Pengantar Feminisme. Anak Hebat Indonesia.
- Fajar Laksmi Dewi. (2021). Peran Perempuan Ciptakan Perdamaian di Daerah Konflik. <https://www.idntimes.com/life/women/fajar-laksmi-dewi-1/peran-perempuan-ciptakan-perdamaian-di-daerah-konflik-akuperempuan>
- Human Rights Council. (2018). "I lost my dignity": Sexual and gender-based violence in the Syrian Arab Republic. <https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/i-lostmy-dignity-sexual-and-gender-based-violence-syrian-arab-republic>
- Kidane, Y. (2014). Women's leadership role in post-conflict peace-building process. *Journal of African Union Studies*, 3(2_3), 87-101. <https://hdl.handle.net/10520/EJC165624>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). PERAN GENDER PEREMPUAN DALAM UPAYA MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DEMI MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DI TINGKAT GLOBAL. *JIDE: Journal Of International Development Economics*, 2(01), 50-74. <https://doi.org/10.62668/jide.v2i01.1011>
- Lederach, J. P. (1997). Sustainable reconciliation in divided societies. Washington, DC: USIP.
- Matondang, E. (2020). Wanita dalam strategi perang: tinjauan emansipasi dan perlindungan wanita. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 10(2), 227-242.
- Mitzy, G. I., & Zahirah, S. (2020). Feminisme Radikal dan Eksploitasi Perempuan Suriah Sebagai Objek Seksual Terkait Imbalan Bantuan Kemanusiaan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(11), 1325.
- Nila Sukmaning Rahayu. (2016). Aktivisme Perdamaian Perempuan di Suriah. [https://www.academia.edu/27891534/Aktivisme Perdamaian Perempuan di Suriah](https://www.academia.edu/27891534/Aktivisme_Perdamaian_Pemempuan_di_Suriah)
- Pattipeilhy, S. C. H. (2021). Perdamaian Negatif dalam Kegagalan Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Konflik Suriah 2011-2019. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(2), 188-206.
- Pontoh, J., KY, I. G. S., & Supriyatno, M. (2019). Analisis Kekerasan Terhadap Perang Di Suriah Dalam Perspektif Konflik Johan Galtung (2011-2017). *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*.
- Rahmad Nasution. (2025). Perempuan Suriah lanjutkan upaya dapat aktif dalam pemerintahan baru. <https://www.antaranews.com/berita/4574934/perempuan-suriah-lanjutkan-upaya-dapat-aktif-dalam-pemerintahan-baru>
- Rhamadhani, S. A., & Suherman, A. (2024). Hubungan Antara Perempuan Dan Peperangan Dalam Pengalaman Serta Dampaknya Dalam Komunitas Sosial. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 283-293. <https://doi.org/10.62379/p37gkb82>
- Sutantri, S. C., & Pratama, O. (2023). Peran Perempuan di Wilayah Konflik (Keterlibatan Perempuan dalam Peacebuilding Konflik Suriah). *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2284-2291. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1942>
- VOA. (2014). Perempuan Suriah Ingin Berperan dalam Pembicaraan Perdamaian. <https://www.voaindonesia.com/a/perempuan-suriah-ingin-berperan-dalam-pembicaraan-perdamaian/1829479.html>
- Wattimena, A. N., & Hutabarat, G. F. I. (2021). Pengaruh femininitas perempuan dalam negosiasi konflik. *Journal of International Relation (JoS)*, 1.
- Zerah Reelaya Waang. (2024). Mampukah Seorang Perempuan menjadi Peacebuilder?. <https://www.srikandilintasman.org/artikel/2024/01/06/mampukah-seorang-perempuan-menjadi-peacebuilder/>
- Ziedhane, A., & Widyarsa, M. R. DAMPAK PERANG TERHADAP MENINGKATNYA KEKERASAN DAN EKSPLOITASI PEREMPUAN DI ALEPPO SURIAH TAHUN 2016-2020.